
**ANALISIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM BANTUAN
SOSIAL PADA MASYARAKAT MISKIN CIANJUR**

**Dini Nurdiani^{1*}, M Reza Ahadian R², R Muhammad Sadam³, Ghina Rahmawati⁴,
Wardah Elyana⁵, Esa Muhammad Y⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

*Corresponding Author e-mail: dnurdiani29@gmail.com

Masuk: Juli 2023

Penerimaan: Agustus 2023

Publikasi: September 2023

ABSTRAK

Cianjur adalah kabupaten di Jawa Barat dengan populasi yang tinggi, mencapai sekitar 2.506.682 jiwa, di mana 234.500 jiwa di antaranya termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu (data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2020). Fokus pembahasan ini adalah strategi kebijakan pemerintah Cianjur dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin, menggunakan data skunder seperti penerima bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tahun 2020-2022. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode deskriptif analisis, menggambarkan keadaan yang menjadi fokus berdasarkan data yang terkumpul, dengan tujuan mendapatkan informasi teliti dan efisien sebagai pedoman penelitian. Metode deskriptif dilakukan dengan analisis time series, membandingkan rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan melihat perkembangan ini, perusahaan dapat merencanakan masa depannya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Populasi dalam penelitian ini mencakup data Akuntabilitas Kinerja DTKS Cianjur dari tahun 2020-2022. Di Dinas Sosial Kota Cianjur, efektivitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh faktor yang dianggap memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. Beberapa faktor tersebut melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penerimaan bantuan, yang seharusnya terdaftar di DTKS tanpa menunggu waktu yang lama. Ketidak sabaran juga muncul karena seringnya terjadi pembaruan sistem, yang menyebabkan beberapa Nomor Induk Keluarga tidak terdaftar atau orang yang sudah bekerja di sektor swasta tidak tercatat. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data DTKS, disarankan untuk Dinas Sosial Kota Cianjur menambah staf di bagian pengelola data DTKS, mengingat banyaknya data yang perlu diperbaiki. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga diperlukan untuk perbaikan data masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat agar segera memperbarui data seperti NIK, nama, dan alamat untuk semua anggota keluarga.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Cianjur; Kebijakan; Kemiskinan.

ABSTRACT

Cianjur, a regency in West Java, faces high population density with approximately 2,506,682 inhabitants, of which 234,500 are categorized as economically disadvantaged (BPS Cianjur Regency data in 2020). This discussion focuses on the government of Cianjur's policy strategies in distributing social assistance to the impoverished community, utilizing secondary data such as recipients of social aid and Integrated Social Welfare Data (DTKS) from the period 2020-2022. The research adopts a case study

approach and employs a descriptive analytical method to depict the focal points based on the gathered data. The objective is to obtain comprehensive and efficient information that can serve as a guide for the research. The descriptive method includes time series analysis, comparing financial ratios from one period to another. This approach allows for an examination of the development, enabling the formulation of future plans based on the Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). The population for this study comprises the Accountability Performance Data of DTKS in Cianjur from 2020 to 2022. In the Department of Social Affairs in Cianjur, the effectiveness of public services can be influenced by factors deemed to have a dominant impact on the public service performance level. These factors include the community's lack of understanding of the procedures to receive aid, resulting in delayed registration in DTKS. Impatience arises due to frequent system updates, leading to some family identification numbers not being registered or individuals with private sector employment not being accounted for. To enhance the verification and validation of DTKS data, it is recommended for the Cianjur Department of Social Affairs to increase the number of staff managing DTKS data. This is essential due to the substantial volume of data requiring correction. Additionally, improving coordination with the Department of Population and Civil Registration is crucial for data rectification or conducting public awareness campaigns to promptly update information such as NIK, names, and addresses for all family members.

Keywords: *Sosial Safety Net; Policy; Poverty.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, yang salah satu upayanya dilakukan melalui pembangunan ekonomi. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dengan fokus meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan, dan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan menjadi kriteria utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan (Andri Nurmalita Suryana, 2017).

Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan yang dialami oleh individu, keluarga, komunitas, atau negara, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan (Suwandi, 2015: 81). Kemiskinan menjadi masalah global, terutama di negara berkembang karena kondisi pembangunan yang belum stabil.

Di Indonesia, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa, mengalami penurunan 0,46 juta jiwa dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023, tercatat 1,6 juta orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Penurunan ini terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, seiring dengan meningkatnya

aktivitas ekonomi, penurunan pengangguran, dan inflasi yang terkendali (kemenkeu.go.id, diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 09.33 WIB).

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari lima daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Barat, mencapai 234.500 jiwa. Data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Cianjur menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 mencapai 10 persen dari total penduduk.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya menangani kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi seluruh dinas. Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyatakan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen dari angka 234.500 jiwa.

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada strategi kebijakan Pemerintah Cianjur dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Data yang digunakan melibatkan penerima bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari periode 2021-2022, serta data pendukung lainnya yang dapat diakses secara resmi melalui www.dinsos.cianjurkab.go.id. Rumusan pembahasan mencakup pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, serta sasaran dan tingkat penerima bantuan sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Chambers dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yangmemiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan(*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Ali Khomsan dkk, 2015: 2).

Pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1997 terkait pengembangan sosial, Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskiman sebagai kondisi yang ditadai oleh ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi (Ali Khomsan dkk, 2015:2).

Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat di definisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Ali Khomsan dkk, 2015: 2).

Menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan. Badan Pusat Statistik untuk menentukan ukuran suatu kemiskinan adalah dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata dibawah garis kemiskinan (bps.go.id diakses pada Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB).

2. Konsep Kemiskinan

Suharto (2003) konsep kemiskinan memiliki berbagai pengertian, tergantung dari cara pandang yang di hunakan. Namun kemiskinan seringkali merujuk pada faktor-faktor penyebab, diantaranya konsep mengenai kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, serta adanya sifat kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan

standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua sifat kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970-an dan 1980-an (Jarnasy, 2004: 8).

3. Penyebab Kemiskinan

Nasikun (2004) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu (Chriswardani Suryawati, 2022: 123):

- a. *Policy induces processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth* perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir

tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

- f. *The marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitative intermediation*: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
- i. *Internal political fragmentation and civil strife*: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes*: bekerjanya sistem sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Adapaun menurut Sharp (Andri, 2017:18) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dilihat dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan didtribusi pendapatn, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya jelek.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan sumber daya manusia yang berarti produktifitasnya rendah yang mengakibatkan upah yang diterima rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro (Andri,2017:18-19) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara enam karakteristik berikut:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.

- b. Pendapatan perkapita negara-negara rendah dan pertumbuhannya sangat lambat bahkan ada beberapa negara yang pertumbuhannya mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat tidak merata atau adanya ketimpangan.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Katasasmita (Andri, 2017:19-20) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu:

a. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

b. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

c. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

d. Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

4. Bantuan Sosial

Secara normatif, definisi mengenai bantuan sosial dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, merujuk pada "bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial." Subjek penerima bantuan sosial juga dijelaskan dalam peraturan tersebut, mencakup seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019).

Tentang pemberian bantuan sosial, diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi. Selain itu, juga bertujuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara diberikan tanpa keharusan setiap tahun anggaran dan dapat dihentikan jika penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Sementara itu, bantuan sosial berkelanjutan diberikan secara terus menerus dengan tujuan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya mengembangkan kemandirian. Pelaksanaan bantuan sosial mencakup pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin (Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019).

5. Jenis Bantuan Sosial

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan mencairkan sejumlah dana bansos untuk triwulan kedua selama April-Juni. Artinya bagi penerima PKH tetapi belum mendapatkan bansos triwulan kedua pada April atau Mei, maka masih ada waktu pencairan hingga akhir Juni 2023.

b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT merupakan salah satu bansos yang rutin diberikan pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan yang bisa dibelanjakan untuk bahan pangan seperti beras, aneka daging, sayur, dan lainnya. Namun beberapa waktu belakangan, BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal yang sama: Rp 200 ribu.

c. PIP Kemendikbud Ristek

Kementerian Pendidikan juga berencana mengalokasikan dana bagi 17,9 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat SD hingga SMA. Nantinya, para pelajar akan diberikan sejumlah dana yang harus digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

d. PIP Kementerian Agama

Sementara, bagi para peserta didik yang di bawah naungan kementerian Agama seperti MI, MTs dan MA juga akan mendapatkan dana bansos seperti halnya PIP Kemendikbud Ristek yang harus digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

e. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Seperti di tahun 2022 pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada para pemilik KIS untuk diberikan bantuan berupa iuran BPJS kesehatan setiap bulannya.

6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyaistatus kesejahteraan sosial terendah (dtkns.kemensos.go.id). Lebih lanjut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, menyatakan pemerintah daerah harus aktif memverifikasi dan memperbarui data penerima bansos sehingga data penerima bansos harus sesuai nama dan alamat serta berbasis nomor induk kependudukan. Penyaluran bansos dari Kementerian Sosial dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing pemerintah daerah. (Ruhya N.dkk.2020).

Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah. Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 12 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri.

Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri. (Rahmansyah W, dkk. 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil penelitian pada obyek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi instansi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk faktor penyebab kemiskinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian yang bersifat sistematis dan objektif, yang bertujuan memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan teliti dan efisien yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metode deskriptif yang dilakukan dengan *time series analysis*, dimana perhitungan yang membandingkan rasio-rasio financial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Perbandingan antara rasio

saat ini dengan rasio pada masa lalu yang akan memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan akan dapat dilihat pada trend dari tahun ke tahun, sehingga dengan melihat perkembangan ini perusahaan dapat membuat rencana-rencana untuk masa depannya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Populasi dalam penelitian ini adalah data Akuntabilitas Kinerja DTKS Cianjur dari Tahun 2020-2022, yaitu sebanyak 3 tahun. Sampel penelitian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan pada DTKS cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja DTKS Cianjur. “Penelitian akan mendapat hasil yang kredibel jika didukung dengan hasil dokumentasi atau karya-karya tulis yang bersifat akademik” (Sugiyono, (2005))

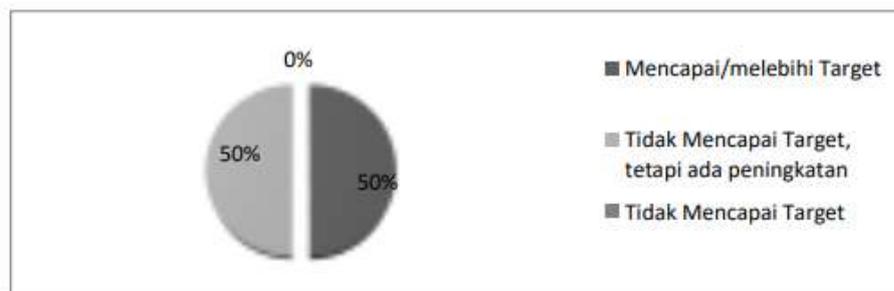
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar terdaftar dalam DTKS masyarakat harus memiliki data identitas yang padan dengan data capil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota melalui Desa/Kelurahan.

2. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.
Pencapaian Sasaran Tahun 2020 Secara Umum

Sumber: Hasil Pengolahan data Dinas Sosial Cianjur

Pada tahun 2020, Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap 1 Misi dan 2 Sasaran dengan menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 4 Indikator yang diukur, seluruhnya 4 Indikator mencapai sesuai target yaitu dikisaran angka 99%-100%.

Berikut ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2021 yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis yang tercantum dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Presentase PMKS yang tertangani	36%	37%	37%	100%	37%	100%

Trend kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 diatas. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini karena peran serta seluruh elemen sosial dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Sosial.



Gambar 2. Grafik Pengukuran Kinerja
 Sumber: Dinas Sosial Cianjur Tahun 2021

Permasalahan: (1) Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal. Solusi: (1) Updating data PPKS secara berkala dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022 yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis yang tercantum dalam tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Tahun 2021 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Angka Kemiskinan	11,18%	10,15%	10,55%	96,21%	8,66%	0,63%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022

Indikator Persentase Angka Kemiskinan mempunyai target capaian tahun 2022 sebesar 10,15% dengan capaian realisasi sebesar 10,55% (belum mencapai target). Ketidaktercapaian target tahun 2022 dikarenakan IPM masih rendah yang mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi.

Tabel 3. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Tahun 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (%)	20%	20%	20,05%	100,25%	100%	40,05%

Sumber: Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022



Gambar 3. Realisasi Kinerja
 Sumber: Dinas Sosial Cianjur Tahun 2022

Sasaran Meningkatkan penanganan PPKS terdiri dari satu indikator kinerja yaitu Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja sebesar 20,05% (mencapai target). Trend kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan

kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 diatas. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini karena peran serta seluruh elemen sosial dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Sosial.

Permasalahan: Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal. Solusi: Updating data PPKS secara berkala dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelayanan DTKS

Ada pun faktor faktor Yang Mempengaruhi efektivitas Pelayanan data terpadu kementerian sosial (DTKS) . Pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur keefektivan suatu pelayanan public dapat mempengaruhi faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap tingkat kinerja pelayanan publik yaitu kekurangan pemahaman Masyarakat terhadap prosedur mendapat bantu dengan harusnya terdaftar di DKTS dengan jangnan waktu yang cukup lama. Ketidak sabaran karena sering terjadi update sistem membuat beberapa Nomor induk keluarga tidak terdaftar atau orang yang sudah memiliki pekerjaan swasta. Dalam Tindakan sosialisasi pun masih terkendala dengan jangkauan daerah yang jalannya sulit di jangkau serta pemahaman teknologi pun masih banyak yang belum bisa mengikuti zaman ketidak pahaman ini membuat kegiatan sosialisasi memakan waktu harus on the spot. Masih banyak juga orang terjadi dobel data karena mereka tidak menguptade dana. Sering juga terjadi pelemparan alur yang harusnya ke pihak desa puskesmas malah di lempar ke dinsos.

Masih banyak juga Masyarakat sudah bekerja lalu keluar meminta bantuan itu harus adanya uptade pada kartu keluarga bahwa sudah tidak bekerja lagi agar mendapat bantuan. Masih banyak juga orang yang Kartu keluarga belum uptade menggunakan barcode yang menjadi kendala. Karena zaman sudah canggih sesuai menggunakan layanan internet tetapi Masyarakat cianjur masih banyak daerah yang masih tertinggal atau kurang paham seperti daerah Selatan

E. KESIMPULAN

Kemiskinan adalah keadaan yang dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Kemiskinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitas, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi.

Kemiskinan dapat di definisikan sebagai standar tingkat kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan memiliki berbagai pengertian, tergantung dari cara pandang yang dihinakan Kemiskinan memiliki 4 bentuk: Absolut, Relatif, Kultural, Struktural, Alamiah, dan Buatan.

Penelitian ini berfokus pada indikator kinerja dari database Penyedia Layanan Sosial (PPKS), yang memiliki target 20.05%. Hasilnya menunjukkan implementasi yang sukses dari program dan kegiatan di komunitas, dengan solusi untuk memperbarui data PPKS secara teratur.

Pengiriman data dalam layanan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan publik tentang proses penyediaan layanan. Di Cianjur, pelayanan publik yang efektif dapat terpengaruh oleh kurangnya pengetahuan publik tentang proses penyediaan layanan. Hal ini disebabkan oleh sistem yang sudah usang, kurangnya teknologi, dan kurangnya pengumpulan data. Selain itu, jumlah orang yang bekerja di bidang yang berbeda dan penggunaan layanan internet juga dapat mempengaruhi efektivitas pengiriman data.

REFERENSI

- Ali Khomsan, dkk. Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, 2015, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dataterpadu Kesejahteraan Sosial.8(5),55.2019-2020.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023. Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html/> diakses pada Selasa 10 Oktober 2023
- Dinas Sosial Cianjur 2022. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. <https://dinsos.cianjurkab.go.id/> diakses pada Selasa 10 Oktober 2023.
- Jarnasy, 2004: 8. Peremberdayaan an penanggulangan kemiskinan. Belantika, Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial No.146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Rahmansyah, W, et al. (2020). pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di indonesia. JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 2(1): 90-102.

Sugiyono. ((2005)). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. . Yogyakarta: Yogyakarta:
Jarnasy.